

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN  
KETIMPANGAN REGIONAL DI ERA  
DESENTRALISASI FISKAL  
(Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode  
2008-2012)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Alfionita Putri Yuana  
105020102111001**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2014**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL DI ERA  
DESENTRALISASI FISKAL  
(Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012)**

Yang disusun oleh :

Nama : Alfionita Putri Yuana  
NIM : 105020102111001  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Malang, 9 Juni 2014

Dosen Pembimbing,



**Dr. Moh Khusaini, SE.,M.Si.,MA**

NIP. 19710111 199802 1 001

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL DI ERA  
DESENTRALISASI FISKAL  
(Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012)**

**Alfionita Putri Yuana**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: alfionitaputri@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini menganalisis pengaruh langsung maupun tidak langsung kinerja keuangan daerah yang diukur dari rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012. Metode analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel tersebut adalah metode analisis jalur (Path Analysis) dengan menggunakan aplikasi software SPSS versi 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung rasio kemandirian dan rasio efektivitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara tidak langsung rasio kemandirian dan rasio efektivitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan regional melalui pertumbuhan ekonomi. Sementara, rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap ketimpangan regional, namun rasio efektivitas tidak memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap ketimpangan regional, sehingga rasio efektivitas dihilangkan menggunakan metode trimming.*

*Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Regional, Analisis Jalur (Path Analysis), Metode Trimming*

---

**A. LATAR BELAKANG**

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan sebuah kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala aktivitas di daerah mulai dari penggalan sumber daya alam yang harus di kembangkan supaya menjadi sumber pendapatan daerah sampai dengan sistem penganggarannya. Hal ini sesuai dengan kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bentuk deregulasi baru. Diharapkan dengan perubahan kebijakan tentang desentralisasi dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terjadi pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta implementasi kebijakan yang lebih fokus dan terarah sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerjanya. Salah satu cara dalam membantu kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam hal kinerja keuangan yaitu dengan melalui kebijakan desentralisasi fiskal, selain itu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dimana, dapat diambil dasar pemikiran bahwa dengan desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih tepat guna dan berdaya guna karena pemerintah kabupaten/kota lebih mengetahui kondisi kebutuhan serta pembangunan daerah, anggaran didalam APBD terbagi antara pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Rahmawati, 2010). Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah dan

desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Sistem penganggaran ini dapat dilihat dari kinerja keuangan di masing-masing daerah. Anggaran yang didapat dimasing-masing daerah tersebut digunakan dalam pembangunan dan penggalan potensi sumberdaya yang dimiliki.

Salah satu bentuk pembangunan di Jawa Timur, dalam rangka pemenuhan di lingkungan badan pemberdayaan masyarakat Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBD Provinsi pada tahun 2011 mencapai 46,71 triliun rupiah, yang terbagi menjadi dua jenis pengeluaran, yaitu belanja aparatur dan belanja publik. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan mencapai 48,87 persen dari total pengeluaran belanja publik di tahun 2011. Sedangkan belanja aparatur mencapai 24,81 persen dari total APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembangunan secara merata di kabupaten/kota Jawa Timur, dimana setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki potensi, demografi dan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, memberikan kewenangan yang semakin luas kepada daerah untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan potensi dan sumber pendanaan yang dimiliki.

Dari aspek demografi, jumlah penduduk Jawa Timur adalah yang kedua terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Timur adalah sebesar 37,477 juta jiwa atau 16 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Dengan demikian, perkembangan ekonomi dan kependudukan yang terjadi di Jawa Timur akan berpengaruh terhadap konstelasi perekonomian nasional. Sebagai kontributor kedua terbesar bagi perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2005 selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2010, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 6,7 persen yang merupakan angka tertinggi di Jawa dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih yang paling besar di Jawa karena memang populasi penduduk Jawa Timur yang sangat besar. Pertumbuhan yang tinggi terpusat di perkotaan seperti Kota Surabaya dan sekitarnya (Sidoarjo dan Gresik), serta Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kota-kota tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi di Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 50 persen terhadap total ekonomi Jawa Timur pada tahun 2010.

Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat harus diimbangi dengan pemerataan di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan regional. Ketimpangan regional ini terlihat dari adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang kurang maju atau terbelakang. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Sementara pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat memunculkan beberapa fenomena dalam penerapannya, yaitu dengan penerimaan yang didapat disuatu daerah dan belanja daerah yang dikeluarkan setiap kabupaten/kota di Jawa Timur yang tidak sesuai juga akan menimbulkan ketimpangan wilayah, dimana hal itu disesuaikan dengan sektor yang dimiliki disetiap kabupaten/kota Jawa Timur. Sesuai dengan perhitungan menggunakan *Indeks Williamson* tahun 2008-2012 diketahui bahwa di Provinsi Jawa Timur ketimpangan dengan skala tinggi terjadi di kabupaten/kota yang memiliki aktivitas perekonomian tinggi, dimana menjadi *center* dari segala kegiatan perekonomian. Dari hasil perhitungan menggunakan *Indeks Williamson* terlihat di Kota Kediri, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember. Sedangkan daerah yang memiliki skala rendah ialah daerah yang memiliki kegiatan perekonomian atau produksi daerahnya

masih rendah, hal ini terlihat seperti di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bondowoso yang memiliki nilai skala Indeks Williamson rendah. Ini juga didukung pendapat Nurhuda et al (2011) yang menyatakan bahwa terlihat pada PDRB kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur yang sangat berbeda, ada beberapa kab/kota yang tingkat perkembangan PDRB relatif cukup tinggi dan cukup rendah, contohnya Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yang mempunyai PDRB yang tinggi. Sedangkan untuk wilayah kabupaten seperti Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bondowoso memiliki PDRB yang rendah. Menurut Purbadharmaja Ida Bagus Putu, 2010 menyebutkan bahwa dalam pasca pemberlakuan desentralisasi adalah melebarnya ketimpangan tingkat kemajuan pembangunan, kesejahteraan, dan kemandirian keuangan antar daerah, sementara dalam hal transfer subsidi yang bersifat blok, bagi kebanyakan daerah tidak mencukupi walaupun daerah memiliki keleluasaan mengelola dana, sedangkan subsidi yang bersifat spesifik mengakibatkan daerah tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola dana. Tujuan desentralisasi fiskal adalah tercapainya kemandirian fiskal daerah, pengelolaan anggaran daerah yang baik, pertumbuhan ekonomi meningkat, mengurangi disparitas pendapatan antar daerah, terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan meningkatkan efisiensi kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Indonesia telah berusaha menetapkan keterbukaan informasi untuk masyarakat agar badan publik dapat mencapai *good governance* dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang lebih dikenal sebagai UU KIP. Menurut Sakapurnama and Safitri (2012) terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi UU KIP yang terdiri dari, keinginan politik (*political will*) dari pemerintahan pusat dan kepala pemerintahan daerah, kemampuan pemerintah, kesalahan yang terdapat di dalam UU KIP itu sendiri, anggaran minimum, infrastruktur, dan budaya masyarakat. UU KIP juga dipersepsikan sebagai suatu undang-undang yang mengatur informasi publik dan bisa membantu badan publik memperbaiki implementasi *good governance*. Pemerintah daerah dianggap lebih bertanggung jawab dan transparan, dan dapat meningkatkan partisipasi publik. Sehingga setiap kabupaten/kota di Jawa Timur dapat meningkatkan penerimaan daerahnya dan dapat mengelola daerahnya dengan pembangunan yang tepat sasaran dan merata. Sebab, di setiap daerah terdapat perbedaan kandungan sumberdaya alam dan adanya konsentrasi kegiatan ekonomi yang berbeda. Maka, perlu adanya analisis kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas. Dengan adanya rasio-rasio tersebut dapat digunakan untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi ketimpangan regional. Sehingga dalam penelitian ini mengambil judul "**Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2008-2012)**".

## B. KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Desentralisasi Fiskal

Konsep desentralisasi fiskal mengarah pada tanggung jawab pemerintah daerah yang memanfaatkan dan menggali sumberdaya daerah yang ada untuk dikelola supaya menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Didalam desentralisasi fiskal, terutama tanggung jawab keuangan yang merupakan komponen inti dari desentralisasi fiskal, dimana fungsi desentralisasi akan berjalan efektif jika ada anggaran yang cukup untuk mendukungnya. Menurut Adirineksa (2001) terdapat beberapa bentuk desentralisasi fiskal yaitu, pembiayaan sendiri atau pengembalian biaya melalui pajak, pengaturan pembiayaan atau produksi antar pengguna dalam menyediakan infrastruktur melalui kontribusi tenaga kerja dan uang, perluasan penerimaan lokal melalui pajak kepemilikan dan penjualan serta pungutan tidak langsung, adanya dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kewenangan daerah untuk mengelola pinjaman daerah. Hal ini didukung dengan pendapat Saragih (2003) yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Penerapan didalam desentralisasi fiskal seperti yang telah diketahui ialah dengan menggunakan prinsip *money follow function*, yang memiliki arti pelimpahan wewenang membawa

konsekuensi pada peningkatan anggaran untuk melaksanakan wewenang tersebut. Dengan demikian kebutuhan anggaran daerah untuk melakukan desentralisasi semakin besar, sebagai konsekuensinya adalah adanya kebijakan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun, dalam pengelolaan pembiayaan desentralisasi harus memperhatikan prinsip efisiensi. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Berdasarkan penelitian (Halim, 2001 dalam Hamzah, 2008), analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Di dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian/aktivitas. Namun, pada penelitian ini yang digunakan adalah rasio kemandirian dan rasio efektifitas. Dimana, rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang.

### **Teori Pertumbuhan Klasik**

#### **Teori Pertumbuhan Adam Smith**

Dalam perekonomian sebuah negara bisa tumbuh ada beberapa aspek, dimana terdapat dua aspek utama didalam pertumbuhan ekonomi (Smith, 1723-90, *Ekonomi Pembangunan*; dalam Hakim, 2002) :

Pertumbuhan output total ini dapat dihitung dengan GDP ataupun GNP). Variabel penentu proses produksi suatu negara dalam menghasilkan output total ada tiga, yaitu:

- a. Sumber daya alam yang tersedia (sebagai faktor produksi tanah),
- b. Sumber daya manusia (jumlah penduduk),
- c. Stok barang kapital yang ada.

#### **Teori Pertumbuhan David Ricardo**

Ricardo (1772-1823), *Ekonomi Pembangunan*; dalam Hakim, 2002 menjelaskan teori pertumbuhan klasik menjadi sebuah model pertumbuhan dengan mempertajam konsep mekanisme proses pertumbuhannya. Ricardo menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor sumber daya tanah, sumber daya manusia, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Pada akhirnya pertumbuhan akan berhenti pula (seperti kesimpulan Adam Smith) dan mencapai titik stasioner meskipun diperlambat oleh akumulasi kapital dan kemajuan teknologi. Jika Adam Smith lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dalam menjelaskan proses terjadinya pertumbuhan, David Ricardo lebih menitikberatkan pada distribusi pendapatan antar pelaku ekonomi dalam menjabarkan mekanisme pertumbuhan.

## Teori Pertumbuhan Thomas Robert Malthus

Menurut (Malthus, *Ekonomi Pembangunan*; dalam Hakim, 2002) keberhasilan pembangunan sebuah perekonomian adalah kesejahteraan negara. Suatu negara akan dikatakan sejahtera jika GNP potensialnya meningkat. Sektor yang dominan adalah sektor pertanian dan industri. Jadi apabila kedua sektor tersebut bisa ditingkatkan maka GNP potensialnya akan bisa dinaikkan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi produksi disektor-sektor tersebut, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi di sini ialah tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Faktor non ekonomi ialah keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, kerja keras masyarakat dan disiplin, serta sikap jujur. Kedua faktor tersebut harus berjalan secara proposional supaya dapat meningkatkan sektor pertanian dan industri dan pada akhirnya meningkatkan GNP potensial.

## Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan Rostow dalam penelitian Tamtomo, 2010 menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang dilewati suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Teori ini diperjelas lagi dengan teori Harrod-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah *capital stock* sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa tingkat tabungan dan *capital stock* yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## Ketimpangan Wilayah

Perbedaan kemajuan antar wilayah yang berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh yang analog dengan kesenjangan sehingga yang timbul adalah ketidakmerataan sehingga muncul pendapat dan studi-studi empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada posisi yang dikotomis dalam hal ini (Kuznet, dalam Todaro, 2006) mengemukakan suatu hipotesis yang di kenal dengan sebutan *U Hypothesis*, hipotesa ini dihasilkan lewat kajian empiris terhadap pola pertumbuhan ekonomi terhadap *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan.

Seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi maka setelah mencapai tahap tertentu *trade off* tersebut akan menghilang diganti dengan hubungan kolerasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan yang disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan di sektor modern lebih cepat dibandingkan sektor tradisional.

## Teori Ketimpangan Wilayah

### *Trickling Down Effect dan Polarization Effect*

Hirschman (1970) dalam tulisannya *Interregional and International Transmission of Economic Growth* membedakan daerah di suatu negara menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (*trickling down effect*). Sedangkan perbedaan antara kedua daerah tersebut melebar berarti terjadi imbas yang kurang baik, atau terjadi proses pengkutuban (*polarization effect*).

### *Spread Effect dan Backwash Effect*

Myrdal dalam Jhingan (1990) menyatakan bahwa ketimpangan regional dalam suatu negara berakar pada dasar nonekonomi. Ketimpangan berkaitan erat dengan system kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Menurut Myrdal dalam Jhingan (2002) yang membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskannya, Myrdal menggunakan dampak balik dan dampak sebar. Dimana, dampak balik didefinisikan sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu tempat, karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dampak sebar menunjuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya.

#### - Ketimpangan Regional

Asal ketidaksetaraan regional dalam suatu negara berakar pada dasar non ekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Ketimpangan regional merupakan akibat dari pertumbuhan yang terjadi tidak merata dengan

beberapa penyebab. Menurut Myrdal dalam Jhingan (2002) menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya melalui dampak balik (*backwash effect*) dan dampak sebar (*spread effect*). *Backwash effect* terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mengakibatkan terjadinya perpindahan sumber daya (tenaga kerja, modal, dll) dari wilayah di sekitarnya. Sehingga wilayah yang awalnya merupakan wilayah yang lebih maju, akan semakin maju dan wilayah yang tertinggal akan semakin tertinggal. *Spread effect* terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mengakibatkan pertumbuhan wilayah disekitarnya, dimana hal ini yang memproduksi bahan mentah untuk keperluan industri yang sedang tumbuh di sentra-sentra tersebut, dan sentra-sentra yang mempunyai industri barang-barang konsumsi akan terangsang. Kemudian Myrdal mengambil kesimpulan ketimpangan wilayah disebabkan oleh lemahnya dampak sebar (*spread effect*) dan kuatnya dampak balik (*backwash effect*).

### **Hubungan Kinerja Keuangan Dengan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Regional**

Kinerja keuangan daerah yang dapat dilihat dari rasio-rasio tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan adanya kemandirian daerah dan pengelolaan daerah secara ekonomis, efektif, dan efisiensi dalam hal sumberdaya yang terdapat di dalam daerah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparaturnya daerah dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah yang selanjutnya akan menurunkan tingkat ketimpangan pada daerah tersebut.

Ketimpangan regional sendiri disebabkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata, hal yang mendasarinya ialah motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Sementara menurut David Ricardo *Ekonomi Pembangunan*; Hakim, 2002 yang menitikberatkan pada distribusi pendapatan antar pelaku ekonomi dalam mekanisme pertumbuhan. Menurut Ricardo, golongan kapitalis, ialah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali hasil pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional lebih besar lagi. Sehingga perlu adanya regulasi dari pemerintah dalam mengatur jalannya pembangunan ekonomi, yang mana ini akan dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder berbentuk time series dari tahun 2008 sampai dengan 2012, dan data cross section yang terdiri atas 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya.

### **Definisi Operasional Variabel**

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Variabel terikat (*dependent*) pada model struktural pertama, yaitu: Pertumbuhan Ekonomi (PE)
- Variabel terikat (*dependent*) pada model struktural kedua, yaitu Ketimpangan Wilayah (*Indeks Williamson*) (IW)
- Variabel bebas (*independent*), yaitu:  
Rasio Kemandirian Daerah (RK), Rasio Efektivitas Daerah (RE).

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno (1978), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Timur menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasar harga konstan di Propinsi Jawa Timur (dalam satuan persen) atau disebut laju pertumbuhan ekonomi. Formula untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi yaitu :

$$PE = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}}$$

Keterangan :

PE = Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)

Y<sub>rt</sub> = Produk Domestik Regional Bruto riil tahun t

Y<sub>rt-1</sub> = Produk Domestik Regional Bruto riil tahun sebelumnya

#### **Ketimpangan wilayah**

*Indeks Williamson* adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan per kapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan per kapita nasional. Sehingga *Indeks Williamson* ini merupakan suatu modifikasi dari standard deviasi. Makin tinggi *Indeks Williamson* berarti kesenjangan wilayah semakin besar, dan sebaliknya. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi. Williamson menggunakan indeks ini untuk mengukur tingkat kesenjangan dari berbagai Negara dengan tahun yang relatif sama. Nilai ini terus meningkat bagi negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya semakin tinggi. Sampai suatu saat tercapai titik balik, dimana tingkat perkembangan ekonomi negara makin tinggi, maka nilai indeksnya semakin rendah.

$$\text{Rumus Indeks Williamson : } IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

Y<sub>i</sub> = PDRB per kapita (dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota)

Y = PDRB per kapita (propinsi)

f<sub>i</sub> = Jumlah penduduk (dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota)

n = Jumlah penduduk (propinsi)

Nilai *Indeks Williamson* berkisar antara 0 – 1 (positif). Semakin besar nilai indeksnya, maka semakin besar juga tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeksnya, maka semakin kecil pula tingkat kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Ketidakmerataan tinggi terjadi pada nilai indeks diatas 0,50. Sedangkan ketidakmerataan dikatakan rendah apabila nilai indeksnya dibawah 0,50.

#### **Kinerja Keuangan Daerah**

Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah di antaranya:

- Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pemerintah Pusat + Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1: **Kriteria Rasio Kemandirian**

Presentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-100 %	Sangat Kurang
10,01-20,00 %	Kurang
20,01-30,00 %	Sedang
30,01-40,00 %	Cukup
40,01-50,00 %	Baik
>50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam Nurhayani 2010

Tabel 2: **Cluster Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2008-2012 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur**

RASIO KEMANDIRIAN	TAHUN
-------------------	-------

KAB/KOTA	2008	2009	2010	2011	2012
Kab Pacitan	SANGAT KURANG				
Kab Ponorogo	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	KURANG
Kab Trenggalek	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	KURANG	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG
Kab Tulungagung	SANGAT KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG
Kab Blitar	SANGAT KURANG				
Kab Kediri	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	KURANG
Kab Malang	SANGAT KURANG	KURANG	KURANG	SANGAT KURANG	KURANG
Kab Lumajang	SANGAT KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG
Kab Jember	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG
Kab Banyuwangi	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	KURANG
Kab Bondowoso	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	KURANG	SANGAT KURANG
Kab Situbondo	SANGAT KURANG				
Kab Probolinggo	SANGAT KURANG				
Kab Pasuruan	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG
Kab Sidoarjo	SEDANG	CUKUP	CUKUP	CUKUP	SANGAT BAIK
Kab Mojokerto	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	KURANG	KURANG	KURANG
Kab Jombang	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG
Kab Nganjuk	SANGAT KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG
Kab Madiun	SANGAT KURANG				
Kab Magetan	SANGAT KURANG				
Kab Ngawi	SANGAT KURANG				
Kab Bojonegoro	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	KURANG	KURANG
Kab Tuban	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	SEDANG
Kab Lamongan	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	KURANG	SANGAT KURANG	KURANG
Kab Gresik	KURANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	BAIK
Kab Bangkalan	SANGAT KURANG				
Kab Sampang	SANGAT KURANG				
Kab Pamekasan	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	KURANG
Kab Sumenep	SANGAT KURANG				
Kota Kediri	KURANG	KURANG	KURANG	SEDANG	SEDANG
Kota Blitar	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG

KAB/KOTA	2008	2009	2010	2011	2012
Kota Malang	KURANG	KURANG	KURANG	SEDANG	SEDANG
Kota Probolinggo	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG
Kota Pasuruan	SANGAT KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG
Kota Mojokerto	SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	KURANG	KURANG	KURANG
Kota Madiun	SANGAT KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG
Kota Surabaya	SANGAT BAIK				
Kota Batu	SANGAT KURANG				

Sumber: DJPK Provinsi Jawa Timur (2008-2012), data diolah

Tabel *cluster* diatas terlihat Kota Surabaya memiliki nilai tertinggi selama 5 tahun berturut-turut dan rasio terendah di Kabupaten Ngawi. Kemudian setelah dilakukan pengelompokan atau sesuai *cluster* seperti tabel diatas terlihat bahwa hasil perhitungan rasio kemandirian daerah pada tahun 2008-2012 terlihat yang memiliki nilai rasio “SANGAT BAIK” adalah Kota Surabaya, sementara Kabupaten Sidoarjo menduduki urutan kedua dengan nilai rasio yang semakin meningkat dari tahun 2008 yang awalnya tergolong “SEDANG”, tahun berikutnya menjadi “CUKUP” sampai tahun 2012 menjadi “SANGAT BAIK”. Selanjutnya di Kabupaten Gresik pada tahun 2008 dinyatakan rasio kemandirian daerahnya “KURANG”, namun ada peningkatan pada tahun berikutnya menjadi “SEDANG” dan pada tahun 2012 menjadi “BAIK”. Kabupaten Ngawi memiliki rasio terendah selama 5 tahun berturut-turut dengan nilai rasio tergolong “SANGAT KURANG”. Ini membuktikan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah di Provinsi Jawa Timur, terutama tahun 2008 sampai tahun 2010 dan nilai rasio yang besar masih dominan di daerah yang memiliki kegiatan perekonomian yang maju, seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik.

- Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang di targetkan. Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan (Halim 2008:234). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 3: Kriteria Rasio Efektivitas

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99 %	Cukup Efektif
75-89 %	Kurang Efektif
Kurang dari 75 %	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011:171)

Tabel 4: Cluster Rasio Efektivitas Daerah Tahun 2008-2012 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur

RASIO EFEKTIVITAS	TAHUN					
	KAB/KOTA	2008	2009	2010	2011	2012
Kab Pacitan		SANGAT EFEKTIF				

<b>KAB/KOTA</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kab Ponorogo	SANGAT EFEKTIF				
Kab Trenggalek	SANGAT EFEKTIF				
Kab Tulungagung	SANGAT EFEKTIF				
Kab Blitar	SANGAT EFEKTIF				
Kab Kediri	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	KURANG EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF
Kab Malang	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF
Kab Lumajang	SANGAT EFEKTIF				
Kab Jember	SANGAT EFEKTIF				
Kab Banyuwangi	SANGAT EFEKTIF				
Kab Bondowoso	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF
Kab Situbondo	SANGAT EFEKTIF				
Kab Probolinggo	SANGAT EFEKTIF				
Kab Pasuruan	SANGAT EFEKTIF				
Kab Sidoarjo	SANGAT EFEKTIF				
Kab Mojokerto	SANGAT EFEKTIF				
Kab Jombang	SANGAT EFEKTIF				
Kab Nganjuk	SANGAT EFEKTIF				
Kab Madiun	SANGAT EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF
Kab Magetan	SANGAT EFEKTIF				
Kab Ngawi	SANGAT EFEKTIF				
Kab Bojonegoro	SANGAT EFEKTIF				
Kab Tuban	SANGAT EFEKTIF				
Kab Lamongan	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF
Kab Gresik	SANGAT EFEKTIF				
Kab Bangkalan	SANGAT EFEKTIF				
Kab Sampang	SANGAT EFEKTIF				
Kab Pamekasan	SANGAT EFEKTIF				
Kab Sumenep	SANGAT EFEKTIF				

KAB/KOTA	2008	2009	2010	2011	2012
Kota Kediri	SANGAT EFEKTIF				
Kota Blitar	SANGAT EFEKTIF				
Kota Malang	SANGAT EFEKTIF				
Kota Probolinggo	SANGAT EFEKTIF				
Kota Pasuruan	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF
Kota Mojokerto	SANGAT EFEKTIF				
Kota Madiun	SANGAT EFEKTIF				
Kota Surabaya	SANGAT EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	KURANG EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF
Kota Batu	SANGAT EFEKTIF	KURANG EFEKTIF	EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF

Sumber: DJPK Provinsi Jawa Timur (2008-2012), data diolah

Berdasarkan pengelompokan sesuai dengan *cluster* dalam tabel diatas disesuaikan dengan kriteria rasio efektivitas daerah. Apabila dilihat pada tabel diatas, tahun 2008 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki rasio efektivitas diatas 100% sehingga dikatakan “SANGAT EFEKTIF”. Namun disini yang memiliki nilai tertinggi ialah Kabupaten Pasuruan, sementara tahun 2009 Kota Madiun “SANGAT EFEKTIF”, Kab Madiun dan Kota Surabaya dikatakan “CUKUP EFEKTIF” dan Kota Batu “KURANG EFEKTIF”. Tahun 2010 Kota Madiun masih berkembang dengan nilai rasio “SANGAT EFEKTIF” dan Kota Batu mengalami peningkatan dengan nilai “EFEKTIF”. Sementara pada tahun 2011 dan 2012 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur sudah mengalami peningkatan rasio efektivitas dengan terlihat banyaknya nilai rasio “SANGAT EFEKTIF” dibandingkan tahun sebelumnya.

### Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah menggunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*). Melalui diagram jalur, secara garis besar sangat membantu untuk menggambarkan pola hubungan kausal antara sejumlah peubah, dan analisis jalur ini memiliki daya guna untuk mencetak atau menguji kausal yang diteorikan dan bukan untuk menurunkan teori kausal tersebut (Riduwan dan Kuncoro, 2007) dengan menggunakan aplikasi *software SPSS versi 15*. Dalam *path analysis* terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung artinya arah hubungan antara dua variabel langsung tanpa variabel lain, sementara pengaruh tidak langsung harus melewati variabel lain. Untuk melihat besarnya pengaruh langsung antar variabel dengan menggunakan koefisien beta atau koefisien regresi yang distandarisasi, adapun besarnya pengaruh tidak langsung dalam *path analysis* adalah dengan cara mengalikan koefisien *path* pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel yang dimaksud yaitu, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional sebagai variabel dependen dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung variabel tersebut dengan rasio-rasio kinerja keuangan daerah, antara lain rasio kemandirian dan rasio efektivitas sebagai variabel independen. Sistem persamaan ini ada yang menamakan sistem persamaan simultan, atau juga ada yang menyebut model struktural. Secara sistematis persamaannya dapat dirumuskan sbb:

$$(1) PE = \alpha_0 + \alpha_1 RK + \alpha_2 RE + \varepsilon_1$$

$$(2) IW = \beta_0 + \beta_1 RK + \beta_2 RE + \beta_3 PE + \varepsilon_2$$

Atau bilamana sudah dibakukan :

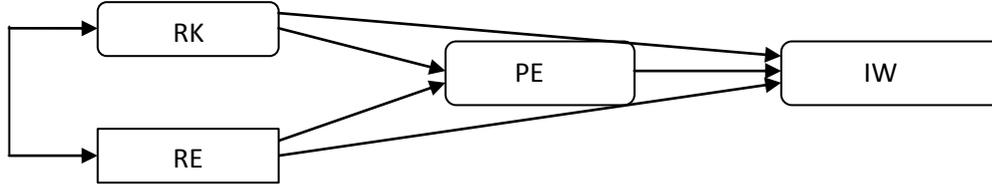
$$(1) Z_{PE} = \alpha_0 + \alpha_1 Z_{RK} + \alpha_2 Z_{RE} + \varepsilon_1$$

$$(2) \quad Z_{IW} = \beta_0 + \beta_1 Z_{RK} + \beta_2 Z_{RE} + \beta_3 Z_{PE} + \varepsilon_2$$

### Model Analisis Jalur Path

Berikut ini adalah model analisis jalur yang akan digunakan dalam penelitian:

Gambar 1: **Model Analisis Jalur Path**



Sumber: Ilustrasi penulis

Keterangan:

IW = Ketimpangan Regional

PE = Pertumbuhan Ekonomi

KK = Kinerja Keuangan Daerah (RK = Rasio Kemandirian, RE = Rasio Efektivitas)

$\beta$  dan  $Z$  = koefisien structural

$e$  = error term

### Langkah – langkah dalam Metode Path Analysis

Tahapan yang dilakukan menurut (Riduwan dan Kuncoro, 2007) dalam melakukan analisis menggunakan metode analisis jalur (path analysis) antara lain:

1. Merumuskan hipotesis persamaan struktural
2. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi
  - a) Gambarkan diagram jalur lengkap, tentukan sub-sub strukturalnya dan rumuskan persamaan strukturalnya yang sesuai hipotesis yang diajukan
  - b) Menghitung koefisien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan
3. Menghitung koefisien jalur secara simultan atau keseluruhan
4. Menghitung koefisien jalur secara individu
5. Meringkas dan menyimpulkan

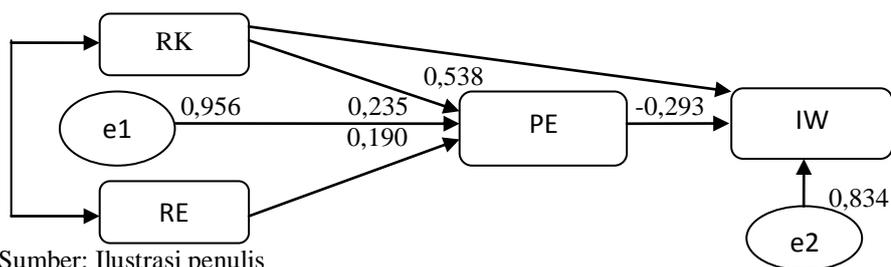
### Analisis Jalur Model *Trimming*

Model *Trimming* merupakan model yang digunakan untuk memperbaiki suatu model struktur analisis jalur dengan cara mengeluarkan dari model variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan (Riduwan dan Kuncoro, 2007). Jadi model ini terjadi ketika koefisien jalur diuji secara keseluruhan dan ternyata terdapat variabel yang tidak signifikan, sehingga peneliti perlu melakukan perbaikan pada model struktur analisis jalur yang telah di hipotesakan. Cara menggunakan analisis jalur model *trimming* ini yaitu dengan menghitung ulang jalur tanpa menyertakan atau langsung menghilangkan variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan tersebut.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengujian analisis jalur terhadap variabel-variabel yang diteliti menggunakan metode *path analysis*, maka untuk selanjutnya akan diuraikan mengenai pembahasan terhadap hasil analisis tersebut. Pembahasan dilakukan untuk melihat sejauh mana hubungan kausalitas yang terjadi sebagai pembuktian terhadap hipotesis yang telah disusun sebelumnya dalam penelitian ini. Teori maupun hasil penelitian empirik yang telah didapat dari pengujian sebelumnya akan digunakan dalam melakukan pembahasan hasil penelitian, apakah teori atau hasil empirik tersebut mendukung ataukah bertentangan dengan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini.

Gambar 2: Model Lintasan Pengaruh Variabel RK, RE, PE dan IW



Sumber: Ilustrasi penulis

Analisis path dalam bentuk persamaan disajikan sebagai berikut.

$$Z_{PE} = 0,235 Z_{RK} + 0,190 Z_{RE} + 0,956$$

$$Z_{IW} = 0,538 Z_{RK} - 0,293 Z_{PE} + 0,834$$

Tabel 5: Rangkuman Dekomposisi dari Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung, dan Pengaruh Total tentang Pengaruh RK, RE dan PE terhadap IW

Variabel	Pengaruh Kausal		
	Langsung	Tidak Langsung Melalui PE	Total
RK → PE	0,235	-	0,235
RE → PE	0,190	-	0,190
RK → IW	0,538	-0,068	0,606
RE → IW	-	-0,056	-
PE → IW	-0,293	-	-0,293

### Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Efektivitas Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian ini memberikan hasil bahwa rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari kedua rasio tersebut memiliki peranan yang signifikan dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Kinerja keuangan daerah dalam kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran sesuai dengan kebijakan daerahnya sendiri memberikan gambaran yang positif dengan adanya tingkat kemandirian daerah, dimana ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat laju pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur. Rasio kemandirian ini akan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tinggi di daerah tersebut. Dengan PAD yang tinggi ini akan memberikan perkembangan yang pesat karena daerah akan lebih maju dan berkembang perekonomiannya, sehingga akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hamzah, 2008) dengan penelitian yang berjudul “Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan” yang menyebutkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam penelitian ini pengaruhnya sebesar 24%, namun memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini terjadi karena pemerintah yang masih kurang tanggap dalam pengelolaan anggaran yang ada dan belum dapat mengelola daerahnya sendiri secara optimal. Apabila pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara bersama-sama menjalankan tugas dan mengaplikasikan kebijakan yang sesuai dengan desentralisasi fiskal, maka APBD yang seharusnya akan tepat dan kinerja keuangan daerah dari segi kemandirian dapat meningkatkan PAD diberbagai daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur sehingga akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Rasio efektivitas merupakan rasio derajat keberhasilan yang akan didapat dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Apabila daerah tersebut mampu merealisasikan peningkatan PAD dengan pelayanan masyarakat yang optimal maka rasio efektivitas akan tinggi. Derajat keberhasilan suatu daerah dalam mengelola anggaran maupun mengelola potensi yang terdapat di daerah tersebut dapat dikaitkan dengan perkembangan perekonomian di daerah itu,

semakin berhasil dalam mencapai target yang diinginkan atau semakin efektif, maka seharusnya perkembangan perekonomian akan meningkat. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, rasio efektivitas memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 19%. Ini membuktikan bahwa rasio efektivitas masih berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, dan sebaliknya. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Faktor penentu efektifitas menurut Budiarto (2007) dalam Hamzah (2008) antara lain, yaitu *pertama*, faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan. *Kedua*, faktor struktur organisasi yang merupakan susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu struktural maupun fungsional. *Ketiga*, faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan. *Keempat*, faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat. *Kelima*, faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud. Sesuai dengan (Ningsih and Razak, 2011) menyebutkan bahwa penerapan *good governance* dimaksudkan agar terciptanya keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap pegawai dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai pegawai maupun adanya keterlibatan dari seluruh pegawai dalam pengembangan organisasi menjadi lebih baik lagi. Prinsip-prinsip *good governance* menurut (Ningsih and Razak, 2011) terdiri dari prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip kesetaraan, prinsip supremasi hukum, prinsip keadilan, prinsip partisipasi, prinsip desentralisasi, prinsip kebersamaan, prinsip profesionalisme, prinsip cepat tanggap, prinsip efektif dan efisien, prinsip berdaya saing.

#### **Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas terhadap Ketimpangan Regional melalui Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh tidak langsung yang terjadi antara rasio kemandirian dan rasio efektivitas terhadap ketimpangan regional melalui pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tidak langsung ini memberikan pengaruh yang negatif signifikan terhadap ketimpangan regional, sebab pengaruhnya rasio-rasio tersebut melalui pertumbuhan ekonomi sebagai perantara atau media. Hirschman (1970) dalam tulisannya *Interregional and International Transmission of Economic Growth* membedakan daerah di suatu negara menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (*trickling down effect*). Sedangkan perbedaan antara kedua daerah tersebut melebar berarti terjadi imbas yang kurang baik, atau terjadi proses pengkutuban (*polarization effect*). Sementara pengaruhnya pertumbuhan ekonomi ke ketimpangan regional negatif, karena hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan adalah negatif signifikan. Pengaruh yang negatif dari pertumbuhan ekonomi ke ketimpangan regional membuat pengaruh tidak langsung dari rasio kemandirian daerah ikut negatif signifikan sebesar 6,8%. Hal ini membuktikan bahwa secara tidak langsung kemandirian daerah dapat berkontribusi terhadap ketimpangan dengan menaikkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat ketimpangan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur sebesar 6,8%. Sementara rasio efektivitas dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai perantara sebesar 5,6%. Pengaruhnya pun juga negatif signifikan seperti halnya pengaruh rasio kemandirian. Ini dapat digarisbawahi jika ingin menurunkan tingkat ketimpangan, maka salah satunya harus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan penelitian Nurhuda et al (2011) yang berjudul "*Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)*" yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Jawa Timur yang akan menurunkan ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian PAD yang semakin besar dan merata pada daerah Provinsi Jawa Timur akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah.

#### **Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas terhadap Ketimpangan Regional**

Rasio kemandirian daerah dan rasio efektivitas dalam penelitian ini setelah dilakukan pengujian menggunakan analisis jalur *path*, ternyata hasilnya terdapat pengaruh rasio kemandirian secara langsung terhadap ketimpangan regional secara positif signifikan sebesar 54%, artinya rasio kemandirian daerah memberikan kontribusi sebesar 54% secara langsung ke ketimpangan regional

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012. Namun, hal ini tidak sebanding dengan hasil dari pengaruh rasio efektivitas, yang mana rasio efektivitas tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga tidak memiliki kontribusi secara langsung terhadap ketimpangan regional. Maka, rasio efektivitas harus dihilangkan dari jalurnya menggunakan metode *trimming*, karena secara langsung tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan regional.

Kinerja keuangan daerah yang diukur dari rasio kemandirian daerah ini langsung berhadapan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola anggaran maupun kebijakan sendiri sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki, dan dari hasil rasio ini memberikan dampak yang positif bagi daerah karena akan menciptakan kesejahteraan masyarakat karena akan terpenuhinya apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Hubungan langsung dengan ketimpangan ialah, ketimpangan regional sendiri disebabkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata, hal yang mendasarinya ialah motif laba. Hal ini didukung oleh teori Myrdal dalam Jhingan (2002) yang membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan pada taraf nasional dan internasional, dimana motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala tersebut ialah peranan bebas kekuatan pasar yang cenderung memperlebar ketimbang mempersempit ketimpangan regional. Sementara menurut Myrdal dalam Jhingan (2002) menyebutkan bahwa ketimpangan regional merupakan akibat dari pertumbuhan yang terjadi tidak merata dengan beberapa penyebab, pertumbuhan suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya melalui dampak balik (*backwash effect*) dan dampak sebar (*spread effect*). *Backwash effect* terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mengakibatkan terjadinya perpindahan sumber daya dari wilayah di sekitarnya. Sehingga wilayah yang awalnya merupakan wilayah yang lebih maju, akan semakin maju dan wilayah yang tertinggal akan semakin tertinggal. *Spread effect* terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mengakibatkan pertumbuhan wilayah disekitarnya, dimana hal ini yang memproduksi bahan mentah untuk keperluan industri yang sedang tumbuh di sentra-sentra tersebut, dan sentra-sentra yang mempunyai industri barang-barang konsumsi akan terangsang.

Dalam penelitian terlihat bahwa selama 5 tahun berturut-turut Kota Surabaya memiliki rasio kemandirian tertinggi sebesar 56,56% pada tahun 2008 dan sampai 2012 masih memiliki nilai rasio tertinggi sampai 159,07%. Kemudian jika dilihat dari nilai ketimpangan regional, Kota Surabaya selama lima tahun berturut-turut juga memiliki skala tinggi pada tahun 2008 sebesar 0,76 sampai pada tahun 2012 sebesar 0,72. Ini sesuai dengan hasil pengujian yang membuktikan bahwa rasio kemandirian daerah memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap ketimpangan regional, semakin besar nilai rasio kemandirian, maka semakin tinggi nilai skala ketimpangan regional suatu daerah. Sehingga, dari rasio kemandirian dalam penelitian memiliki pengaruh langsung yang positif signifikan, dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki ini akan menurunkan tingkat ketimpangan suatu daerah. Maka dengan kontribusi rasio kemandirian yang besar terhadap ketimpangan regional tersebut, perlu adanya regulasi dari pemerintah dalam mengatur jalannya pembangunan ekonomi, yang mana ini akan dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Sakapurnama and Safitri (2012) bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari, keinginan politik (*political will*) dari pemerintahan pusat dan kepala pemerintahan daerah, kemampuan pemerintah, kesalahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri, anggaran minimum, infrastruktur, dan budaya masyarakat. Undang-undang tersebut juga dipersepsikan sebagai suatu undang-undang yang mengatur informasi publik dan bisa membantu badan publik memperbaiki implementasi *good governance*. Pemerintah daerah dianggap lebih bertanggung jawab dan transparan, dan dapat meningkatkan partisipasi publik.

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui pengaruh antara kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian daerah dan rasio efektivitas daerah, dimana memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2012. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian daerah dan Rasio Efektivitas daerah memiliki pengaruh positif signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, serta keduanya berkontribusi sebesar 25% dan 19% terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Maksud dari hasil rasio kemandirian yaitu, setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi secara positif kenaikan rasio kemandirian sebesar 25%. Sementara hasil dari rasio efektivitas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi secara positif kenaikan rasio efektivitas sebesar 19%. Hal ini berarti bahwa kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah lebih mudah melihat dan mengevaluasi kinerja tersebut yang langsung memiliki pengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
2. Rasio Kemandirian Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap ketimpangan regional sebesar 54% di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pengaruh tidak langsung rasio kemandirian daerah terhadap ketimpangan regional melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%.
3. Rasio Efektivitas Daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan secara langsung terhadap ketimpangan. Artinya, tidak memiliki kontribusi terhadap ketimpangan regional di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Namun, rasio efektivitas memiliki pengaruh tidak langsung terhadap ketimpangan regional melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%.
4. Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jawa Timur sebesar 29%. Artinya, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menurunkan ketimpangan regional dan sebaliknya. Setiap kenaikan 1% ketimpangan regional akan mempengaruhi secara negatif penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 29%. Hal ini memberikan gambaran bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012 akan menurunkan tingkat ketimpangan di daerah tersebut.
5. Sementara pengaruh total dari pengaruh secara langsung rasio kemandirian daerah terhadap ketimpangan regional sebesar 61%.
6. Kebijakan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012, dengan melihat gambaran dan hasil kinerja keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan rasio kemandirian daerah dapat secara langsung meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat ketimpangan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dengan rasio efektivitas daerah juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara langsung dan menurunkan tingkat ketimpangan secara tidak langsung, namun tidak dapat mempengaruhi ketimpangan secara langsung.
7. Rasio kemandirian daerah dalam tabel *cluster* yang mana masih banyaknya daerah di kab/kota Jawa Timur yang memiliki rasio kemandirian "SANGAT KURANG", terutama di Kabupaten Ngawi memiliki nilai rasio terendah. Sementara kebanyakan rasio efektivitas di kab/kota Jawa Timur memiliki nilai rasio "SANGAT EFEKTIF" hal ini dibuktikan pada tahun 2012 di dalam tabel *cluster* terlihat bahwa rasio efektivitas ini sudah berjalan baik di Provinsi Jawa Timur.

## Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diajukan secara khusus bagi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan daerah yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam desentralisasi fiskal yaitu dengan menekan pengelolaan anggaran daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola anggarannya sendiri. Disini, kinerja keuangan daerah yang lebih utama harus lebih tepat sasaran karena dengan rasio kemandirian daerah yang terdeteksi memiliki kontribusi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan regional di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Sehingga peran pemerintah daerah harus lebih dioptimalkan daripada pemerintah pusat agar lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan kebijakan yang akan diambil dapat diaplikasikan dengan baik, serta akan berdampak positif terhadap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun berikutnya. Sebab, jika dilihat dari hasil *cluster* rasio kemandirian di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur masih banyak daerah yang memiliki rasio rendah dan yang sangat rendah ialah Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan dan sekitarnya. Maka perlu adanya kebijakan dan peran dari pemerintah daerahnya.
2. Pemerintah diharapkan dapat cepat mengambil langkah dengan melihat kontribusi yang dihasilkan pada variabel-variabel didalam penelitian yang lebih menekankan pada kemandirian

daerah apabila ingin menekan ketimpangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab rasio efektivitas dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan hanya dapat mempengaruhi ketimpangan secara tidak langsung, dan apabila dilihat dari *cluster* rasio efektivitas di kebanyakan daerah kab/kota Provinsi Jawa Timur sudah sangat efektif. Ini terlihat di tabel pada tahun 2012 yang dapat dikatakan cukup efektif hanya Kota Surabaya, kab/kota yang lain memiliki nilai diatas 100% yaitu sangat efektif. Sehingga pemerintah lebih tahu kebijakan apa yang akan diberikan untuk mempengaruhi peningkatan rasio efektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat pertama kalinya dari kinerja keuangan daerah masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan desentralisasi fiskal Provinsi Jawa Timur.

3. Kebijakan yang diberikan pemerintah daerah ialah kebijakan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun meningkatkan kesejahteraan daerah. Dalam hal ini sangat berpengaruh di bidang keuangan daerahnya, sebab keuangan daerah di berbagai kabupaten/kota yang diolah secara baik akan mendukung potensi daerah yang dimilikinya. Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dan juga untuk mengurangi tingkat ketimpangan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adinirekso, Gidion P. 2001. *Faktor-Faktor Yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Optimal Dalam Era Desentralisasi Di Indonesia*.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama, Yogyakarta. BPF.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Kabupaten/Kota Jawa Timur 2008 – 2012*. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2013*. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. *Deskripsi dan Analisis APBD 2012*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hakim, Abdul. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi I, Yogyakarta: Ekonesia.
- Hamzah, Ardi. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)*.
- Hirschman, Alberto. 1970. *Teori dan Praktek Otonomi Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Jinghan, M L. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jhingan, M L. 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UII Press.
- Ningsih N, Razak A dan Indar. 2011. *Analisis Hubungan Prinsip-Prinsip Good Governance Dengan Kinerja Pegawai Di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur*.
- Nurhayani, 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Rengat*.
- Nurhuda, Rama et.al. 2011. *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)*.
- Purbadharmaja Ida BP. 2010. *Implikasi Desentralisasi Fiskal Dan Good Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Provinsi Bali)*.
- Rahmawati, Nur Indah. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah*.
- Riduwan, Kuncoro. 2007. *Cara Menggunakan Dan Memakai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sakapurnama E dan Safitri N. 2012. *Good Governance Aspect in Implementation of The Transparency of Public Information Law*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukirno, Sadono. 1978. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Medan: Borta Gorat.

- Tamtomo, Edi. 2010. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah)*.
- Todaro, Michael. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*, Jakarta: Erlangga.